

Nama : Yulia Wulandari
NIM : 3311901044
Kelas : IF 5B Reguler

MOSI : Dewan Ini Akan Mewajibkan Pencari Kerja dan Mahasiswa dari Negara Asing Memiliki Sertifikat UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia)

Berdasarkan ukbi.kemdikbud.go.id, UKBI adalah sarana uji untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia lisan atau tulis. UKBI terdiri atas lima seksi, yaitu Seksi I (Mendengarkan), Seksi II (Merespons Kaidah), dan Seksi III (Membaca) dalam bentuk soal pilihan ganda serta Seksi IV (Menulis) dalam bentuk presentasi tulis dan Seksi V (Berbicara) dalam bentuk presentasi lisan. Peraturan untuk mewajibkan para pencari kerja dan mahasiswa dari negara asing harus memiliki sertifikat ukbi telah di bahas dan dipertanyakan sejak tahun 1980-an, karena tercetus pendapat yang mempertanyakan mengapa jika orang Indonesia memasuki negara asing baik untuk bekerja atau sekolah harus lolos TOEFL, sedangkan bagi orang luar negeri yang akan memasuki negara Indonesia tidak memerlukan persyaratan seperti itu. Maka dari itu, disusunlah ukbi dan diluncurkan secara resmi pada tahun 2007.

Ada sisi positif dan negatif dari pemberlakuan peraturan ini, yakni untuk sisi positif seperti yang telah disampaikan oleh tim pemerintah. Pemberlakuan peraturan ini sendiri bertujuan untuk memudahkan komunikasi antara penduduk lokal dengan pekerja dan mahasiswa asing. Komunikasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam bersosialisasi, untuk itu pemberlakuan peraturan ini juga memiliki maksud agar pekerja dan mahasiswa asing tidak merasa sulit untuk berkomunikasi dengan penduduk lokal. Selain itu, pekerja dan mahasiswa asing tentu saja harus memiliki komunikasi yang baik dengan rekan kerja, teman, serta pengajar agar tidak terjadi kesalahpahaman dan *miss* komunikasi. Jika pekerja dan mahasiswa asing menguasai bahasa Indonesia, hal ini akan berdampak pada meluasnya pengguna bahasa kita, serta dapat membuat bahasa Indonesia lebih dikenal oleh bangsa asing. Namun, berdasarkan argumen dari sisi oposisi, pemberlakuan peraturan ini membuat para calon pekerja dan mahasiswa asing merasa keberatan untuk bekerja dan belajar di Indonesia dan berdampak berkurangnya para pendatang asing. Maka dari itu, untuk berkomunikasi seharusnya tidak menggunakan batasan apapun, namun jika mereka menguasai bahasa Indonesia akan lebih baik, namun tidak diwajibkan. Selain itu, dengan pemberlakuan peraturan ini juga berakibat pada terhambat atau terhalangnya kegiatan ekonomi yaitu investasi oleh perusahaan asing. Argumen ini mendapat respon dari sisi pemerintah, bahwa tidak masalah jika pekerja dan mahasiswa asing berkurang untuk masuk ke Indonesia, sebab dengan itu kita bisa lebih mengunggulkan dan mempekerjakan pekerja dan mahasiswa lokal.

Menurut saya, pemberlakuan peraturan ini adalah tindakan awal yang baik untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Sebab banyak dampak positif yang bisa kita dapatkan, salah satunya dapat kita lihat seperti kondisi saat ini. Dengan banyaknya pekerja dan mahasiswa asing yang memasuki Indonesia, kita cenderung lebih mengunggulkan mereka, padahal seharusnya kita mengutamakan posisi pekerja dan mahasiswa lokal dulu, untuk itu jika berkurangnya pekerja dan mahasiswa asing kita dapat menggunakan kembali sumber daya manusia lokal yang ada di Indonesia. Selain itu, pemberlakuan peraturan ini juga bertujuan agar pekerja dan mahasiswa lokal mudah berkomunikasi dengan baik bersama penduduk lokal sehingga merasa nyaman untuk tinggal di Indonesia.

MOSI : Dewan Ini Akan Menghapus Aplikasi TikTok Karena Menganggap Bahwa TikTok Dapat Mengikis Etika Generasi Muda

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Microsoft* pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat ke-29 dari 32 negara di dunia dengan tingkat kesopanan pengguna internetnya. Dan Indonesia adalah negara dengan peringkat paling rendah di negara ASEAN. Hal ini merupakan fakta yang sangat miris, padahal Indonesia dikenal dengan negara yang beretika timur dengan tingkat keramah tamahan-nya yang baik. Salah satu penyebab dari hasil riset ini adalah karena mayoritas pengguna internet di Indonesia minim edukasi. Salah satu aplikasi yang dinilai memberi dampak buruk pada pengguna media sosial di Indonesia adalah aplikasi TikTok. Lebih dari 85% video yang ada di aplikasi ini adalah video hiburan bukan edukasi.

Untuk itu, dijamin seperti sekarang ini sangat diperlukan kemampuan diri untuk dapat menyaring mana konten yang baik untuk diri kita dan mana konten yang tidak memiliki manfaat. Namun, tentu saja kemampuan untuk menyaring konten baik dan buruk ini tidak dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun, aplikasi ini tidak serta merta memberi dampak negatif saja. Aplikasi ini juga dinilai mampu memberi hiburan dan edukasi di masa pandemi seperti ini. Dengan TikTok, seseorang bisa mendapatkan ilmu meski hanya dirumah saja dan mendapatkan hiburan ketika bosan atau lelah. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga dapat meningkatkan tingkat kreativitas masyarakat dengan membuat berbagai konten yang menarik. Dari sisi ekonomi juga memiliki dampak yang cukup baik, yaitu mampu untuk menunjang ekonomi negara Indonesia karena pengguna aplikasi ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan argumen dari sisi oposisi, adat serta perilaku kita berasal dari lingkungan sosial kita sehari-hari bukan berasal dari konten video TikTok. Jadi, TikTok bukanlah penyebab etika masyarakat Indonesia mengalami penurunan.

Namun, argumen bahwa perilaku seseorang hanya berasal dari lingkungan sekitar bukan berasal dari konten video TikTok adalah salah. Mengapa? Karena tontonan video juga memiliki pengaruh yang cukup besar untuk masyarakat saat ini. Banyak masyarakat baik dari anak-anak sampai orang dewasa mengikuti dan mencontoh hal tidak baik yang mereka tonton di TikTok. Khususnya dimasa pandemi seperti ini, kita dituntut untuk dapat melek teknologi, semua kalangan umur harus bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Sayangnya, tidak semua orang mampu memanfaatkan teknologi dengan baik dan malah menjadi bumerang untuk diri sendiri. Selain itu, konten TikTok juga mayoritas hanya berisi konten hiburan, bukan konten edukasi. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa TikTok tidak mengedukasi masyarakat dan hanya menghibur. Selain itu, TikTok mungkin memang memblokir serta menghapus video yang tidak baik, tetapi kita tidak membatasi perilaku dan kreativitas seseorang untuk membuat sebuah konten.

Maka dari itu, untuk dapat menjadi pengguna internet yang bijak, kita harus mengedukasi diri sendiri dan lingkungan sekitar mana hal baik dan mana hal buruk. Selain itu, pemerintah juga harus mendukung proses edukasi ini dengan membatasi konten yang tersedia. Menghapus TikTok juga menurut saya adalah salah satu langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk menjadikan netizen Indonesia agar lebih baik dalam etika penggunaan internet, dikarenakan tidak dapat dipungkiri kita tidak bisa membatasi siapapun untuk berkreativitas maka dari itu kita harus mengambil langkah aman.